

Lampiran I
TARGET KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA		KONDISI AWAL (2013)	TARGET 2016
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	1	Meningkatnya hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional (*)	2,693	3,000
		2	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan administrasi umum pemerintahan	2	Persentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi (*)	312 temuan	10 (234 Temuan)
2	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintahan	3	Meningkatnya peran pengawasan internal dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	3	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD (*)	32,2	60
				4	Persentase penyelesaian TLHP OPD Provinsi dan Bnatuan Keuangan Kab/Kot	75	85
				5	Dipertanyakannya opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat (*)	WTP	WTP
3	Meningkatnya mutu dan akuntabilitas kinerja OPD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4	Meningkatnya peran pengawasan dalam pembinaan dan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat	6	Persentase jumlah OPD yang nilai evaluasi LAKIP adalah B ke atas (*)	>B = 12 OPD (20%)	80
				7	Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat (*)	CC	A (80-85)
4	Meningkatnya sistem pengendalian internal, transparansi, dan kualitas pelayanan publik	5	Meningkatnya pembinaan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah	8	Persentase jumlah OPD yang melaksanakan SPIP (*)	0	75
		6	Meningkatnya nilai pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat	9	<u>Persentase / meningkatnya kualitas nilai indikator RAD-PPK</u>	<u>100</u> (indicatorhijau)	100
				10	Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat	60	75

	oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.						
5	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal	7	Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk pengawasan internal	11	Jumlah Auditor dan P2UPD bersertifikasi	62	93
				12	Jumlah auditor berkualifikasi Pengendali Teknis	4	20
				13	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat	I	III